

336.24 of
RIR
D
2011

Record: 20199
Reg: 22983

**DAMPAK PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA PALEMBANG TERHADAP BIAYA YANG DIKELUARKAN
MASYARAKAT**



Skripsi Oleh :
RIRI DWI YASTUTI
NIM 01061002050
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat - syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : RIRI DWI YASTUTI
NIM : 01061002050
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN
UMUM DI KOTA PALEMBANG TERHADAP BIAYA
YANG DIKELUARKAN MASYARAKAT

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Agustus 2011

Ketua,



Prof. H. Syamsurijal AK, Ph. D
NIP. 195212121981021001

Anggota,



Drs. Nazeli Adnan, M.Si
NIP. 195804171988101002

Anggota,



Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si
NIP.196007101987031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP. 196805181993031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riri Dwi Yastuti
NIM : 01061002050
Jurusan : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi Pembangunan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
“Dampak Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang Terhadap Biaya Yang Dikeluarkan Masyarakat”

Pembimbing:

Ketua : Prof. H. Syamsurijal. AK, Ph. D
Anggota : Drs. Nazeli Adnan, M. Si
Tanggal diuji : 29 Juli 2011

Adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 4 Agustus 2011

Yang memberi pernyataan,

Hormat saya,



Riri Dwi Yastuti

NIM. 01061002050

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa:

Nama : Riri Dwi Yastuti

NIM : 01061002050

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

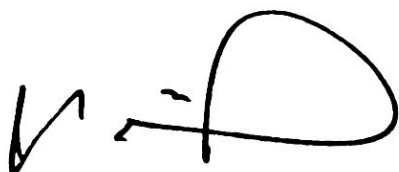
Judul : Dampak Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang Terhadap Biaya Yang Dikeluarkan Masyarakat

Telah kami periksa cara penulisan grammer, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, Agustus 2011

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Prof. H. Syamsurijal AK, Ph. D

NIP. 195212121981021001

Anggota,



Drs. Nazeli Adnan, M. Si

NIP. 195804171988101002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Tidak ada jalan untuk mencapai Allah kecuali ilmu. Dan ilmu merupakan perhiasan bagi manusia di dunia ini dan di akhirat nanti, menuntunnya menuju surga, dan dengan sarana itu dia memperoleh ridha Allah.*
(Imam Ja'far Ash-Shadiq)
- *Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu tugas, mulailah dengan tugas yang lain dengan sungguh-sungguh dan hanya pada Tuhan Mu lah kamu berharap.*
(QS. Asy Syarah: 6-8)
- *Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.*
- *Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)*
- *Hanya kebodohan meremehkan pendidikan. (P.Syrus)*

Kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah S.W.T karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “**Dampak Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang Terhadap Biaya Yang Dikeluarkan Masyarakat**”. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna jalan di jalan Kol. Atmo dan data sekunder yang diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pungutan parkir di tepi jalan umum, khususnya di jalan Kol. Atmo memberikan dampak positif dan dampak negatif. Efektifitas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang dinilai masih belum cukup efektif.

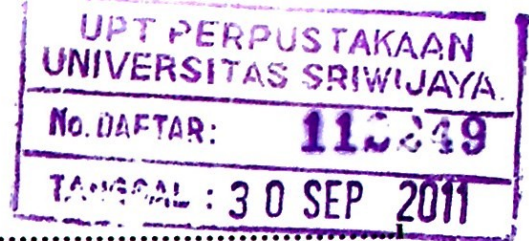
Masih banyak sekali kelemahan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga nantinya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Pembimbing I Skripsi.
3. Bapak Dr. Azwardi, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Drs. Nazeli Adnan, M.Si, Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Pembimbing II Skripsi.
- Bapak Drs. H. M. Hibzon MB, M.Si, Pembimbing Akademik.
- Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, Penguji Skripsi.

7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
 8. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
 9. Kakak dan adik-adikku (Kak Angga, Rizki, Tiara & Ajie) yang telah memberikan dukungan moril.
 10. Semua instansi di Palembang yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
 11. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
 12. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi: Chicitri, Yona, Iraa, Sherly, Syaiful dan Laily.
 13. Teman-teman angkatan 2006 di Jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya Helda, Uus, Diana, Yalen, Lisa, Fifit dan Titin. Terima kasih atas dukungan dan kebaikannya selama ini.
- Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,
Riri Dwi Yastuti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori Retribusi.....	11
2.2. Pengertian Retribusi Secara Umum dan Retribusi Daerah.....	14
2.2.1 Konsep Retribusi.....	19
2.2.2 Golongan Retribusi Daerah.....	20
2.2.3 Karakteristik Retribusi Daerah.....	21
2.2.4 Manfaat Retribusi.....	21
2.2.5 Fungsi Retribusi.....	22
2.3. Pengertian Parkir.....	23
2.3.1 Potensi dan Dampak Parkir Tepi Jalan Umum.....	24
2.3.2 Kapasitas Jalan.....	26
2.3.3 Parkir Pada Badan Jalan.....	27
2.3.4 Biaya Dalam Sistem Transportasi.....	27
2.4. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.....	29
2.5. Penelitian Terdahulu.....	31

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5. Teknik Analisis Data.....	38
3.6. Batasan Variabel	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum.....	42
4.1.1.1 Kependudukan	44
4.1.1.2 Dasar Pengenaan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.....	45

4.1.1.3	Perkembangan Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang.....	47
4.1.1.4	Persebaran Titik Parkir Jalan Umum di Kota Palembang.....	50
4.2.	Pembahasan.....	52
4.2.1	Dampak Positif dari Adanya Parkir Tepi Jalan Umum Khususnya di Jalan Kol Atmo.....	52
4.2.1.1	Efektifitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang.....	56
4.2.1.2	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap PAD Kota Palembang.....	60
4.2.1.3	Manfaat Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Jalan Kol Atmo.....	63
4.2.2	Dampak Negatif dari Adanya Parkir Tepi Jalan Umum Khususnya di Jalan Kol Atmo.....	65
4.2.2.1	Biaya Sosial yang Ditimbulkan Akibat Adanya Pungutan Retribusi Parkir Jalan Umum di Jalan Kol Atmo.....	67
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	72
5.2.	Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	4
Tabel 4.1	Data Kecamatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kota Palembang.....	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2000-2010.....	45
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2000-2010.....	48
Tabel 4.4	Titik Parkir di Kota Palembang.....	50
Tabel 4.5	Rata-rata Pendapatan Bersih Hari Sabtu yang Disetor ke Dinas Perhubungan.....	54
Tabel 4.6	Rata-rata Pendapatan Bersih Hari Senin dan Rabu yang Disetor Ke Dinas Perhubungan.....	55
Tabel 4.7	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Parkir di Jalan Kol. Atmo.....	56
Tabel 4.8	Efektifitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang.....	56
Tabel 4.9	Tingkat Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap PAD Kota Palembang Tahun 2000-2010.....	61
Tabel 4.10	Jumlah Pengguna Jasa Parkir, Omzet penerimaan/hari, Jumlah Juru Parkir, Gaji Juru Parkir dan Pendapatan disetor /hari di jalan Kol Atmo.....	64
Tabel 4.11	Rata-rata Biaya Sosial yang Dikeluarkan Masyarakat Per Kendaraan/hari.....	66
Tabel 4.12	Rata-rata Volume Lalu lintas Kendaraan di Ruas Jalan Kol Atmo.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Skema Penetapan Lokasi Parkir.....	47
Gambar 4.2	Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang.....	49
Gambar 4.3	Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2000-2010.....	58
Gambar 4.4	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang Tahun 2000-2010.....	62
Gambar 4.5	Tindakan Tidak Disiplin Pengguna Jasa Parkir.....	69

DAMPAK PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA PALEMBANG TERHADAP BIAYA YANG DIKELUARKAN MASYARAKAT

ABSTRAKSI

Oleh :
Riri Dwi Yastuti

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis dampak yang ditimbulkan dari adanya pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum khususnya di jalan Kol Atmo Kota Palembang dan 2) menghitung efektifitas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya parkir di tepi jalan umum khususnya di jalan Kol. Atmo menimbulkan dampak. Baik dampak positif maupun negatif. Adapun salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari adanya parkir di tepi jalan umum ini adalah memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir untuk menuju tempat yang mereka tuju yang pada akhirnya memberikan sumbangan terhadap PAD. Sedangkan salah satu dampak negatif yang terjadi adalah terciptanya kemacetan di sepanjang jalan Kol. Atmo akibat adanya manuver keluar masuk kendaraan dari tempat parkir. Efektifitas pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum masih belum optimal. Hal ini pemungut retribusi kesulitan dalam menginventaris titik parkir yang ada di Kota Palembang. Kurang disiplinnya tindak para pengguna jalan dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan disepertaran jalan Kol Atmo.

Untuk mengurangi dampak negatif yang tercipta dari adanya pungutan retribusi parkir tepi jalan, pemerintah daerah Kota Palembang dapat menciptakan *off street parking*. Dengan adanya *off street parking*, kemacetan di sepanjang jalan Kol. Atmo dapat dikurangi.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Dampak Parkir Tepi Jalan Umum

Effect of Collection of Street Parking Fees in Palembang City on the Public Expenses

ABSTRACT

By:
Riri Dwi Yastuti

This research was aimed at (1) analyzing the effect of street parking fee collection on the public expenses, and (2) the effectiveness of such collection in Palembang City.

The research result show that street parking fee collection along Col. Atmo Street effected the public expenses, both in negative and positive ways. The positive effect was that the public car owners had access to their destination and they contributed incomes for the city. The negative effect was that the areas for the parking created hindrances to other passing cars, they created traffic jams along street. The parking fee collection was less effective. The fee collectors found it to manage the system because no inventory was created yet and public users broke the parking rules and caused traffic jams along Col. Atmo Street.

In order to prevent illegal fee collection, the Palembang City is recommended to create off street parking. The system will minimize traffic jams along the street.

Key words: parking fee, effect, public parking

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental. Hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata.

Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara semua bidang (Arsyad, 1997 : 10).

Menurut Schumpeter (dalam Jhingan 2007: 125), pembangunan adalah proses perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam kehidupan perekonomian di mana unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan yang ada dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai.

Demi mencapai tujuan tersebut, maka sejak 1 Januari 2001 Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan pada

Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah harus lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemampuan keuangan daerah sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kota Palembang sebagai salah satu daerah otonom yang sedang melaksanakan pembangunan, kegiatan pemerintahan daerah pada umumnya selalu meningkat karena pemerintah daerah bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan. Kegiatan pemerintah yang semakin meningkat diperlukan pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pemerintah. Pembiayaan kegiatan pemerintah itu dapat dipenuhi dengan adanya penerimaan pemerintah.

Penerimaan pemerintah diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus cermat dalam mengelola sumber keuangan

yang ada, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah didukung oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar. Dalam hal ini retribusi memang tidak memberi peran sepenting atau sebesar pajak. Akan tetapi bagi pembangunan daerah retribusi sangat berpengaruh terhadap perekonomian serta perkembangan daerah tersebut, apalagi saat ini setiap daerah bebas mengatur sendiri urusan daerahnya (otonomi).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang-barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Sebagai contoh yang paling kasat mata adalah retribusi parkir. Memang pemasukan dari retribusi di masing-masing daerah berbeda, sesuai dengan ketentuan yang ada di daerah itu sendiri, tetapi apabila dilihat lebih jauh presentase dari sektor ini juga tidak bisa dikatakan sedikit. Sebagai contoh yang ada di kota-kota besar yang selalu menerapkan regulasi tersendiri untuk pengelolaan retribusi daerahnya. Manfaat dari retribusi ini pun akan langsung dapat dinikmati oleh para pembayarinya.

Definisi retribusi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi berdasarkan asas manfaat dimana besarnya retribusi tergantung dari besarnya manfaat dari jasa yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi memiliki dua prinsip yaitu retribusi sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan retribusi sebagai pengatur (*regulatory*). Sebagai sumber pendapatan berarti hasil yang didapatkan dari penarikan retribusi terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu kota akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Dana hasil retribusi inilah nantinya yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai pengatur artinya retribusi memiliki fungsi mengatur suatu kegiatan retribusi itu dibebankan. Contoh dari fungsi pengatur ini adalah pada kegiatan penggunaan lingkungan dan juga kegiatan yang menimbulkan gangguan umum. Kegiatan-kegiatan ini dikenakan biaya retribusi itu sendiri lebih menjalankan peran sebagai pengatur dari kegiatan-kegiatan tersebut misalnya pengatur agar kegiatan pemanfaatan lingkungan tidak sampai merusak lingkungan itu sendiri. Dari dua prinsip retribusi sebagai sumber pendapatan dan pengatur ternyata juga dimiliki oleh pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pajak dan retribusi itu sendiri. Perbedaan antara pajak dan retribusi itu terlihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perbedaan Pajak dan Retribusi

Komponen	Retribusi	Pajak
Subjek	Tidak tetap	Tetap
Sifat	Tidak memaksa	Paksaan
Objek	Toll / club goods	Public goods dan common goods
Manfaat bagi pelaku (subjek)	Langsung	Tidak langsung
Beban pengenaan	Tidak dapat digeser ke pihak lain	Dapat digeser
Dampak	Hanya mengurangi konsumsi	Mengurangi konsumsi dan investasi / tabungan

Sumber: Pembiayaan Pembangunan (Teori dan Konsep Retribusi)

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa retribusi bersifat tidak memaksa.

Masyarakat sepenuhnya memiliki hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan layanan jasa dari pemerintah, mereka harus membayar retribusi untuk jasa tersebut. Selain itu retribusi memberikan manfaat langsung bagi subjek sementara pajak tidak langsung. Contoh sederhana dari hal ini adalah jasa parkir. Masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan langsung mendapatkan manfaat dengan membayar retribusi pelayanan parkir, sementara pajak kendaraan bermotor tidak langsung dirasakan pengguna kendaraan karena uang hasil pajak itu tidak sepenuhnya digunakan untuk perbaikan sarana prasarana lalu lintas seperti jalan.

Pemerintah Daerah Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang adalah retribusi parkir. Retribusi parkir dicirikan oleh adanya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan perparkiran. Pelayanan dalam bentuk penyediaan fasilitas parkir oleh pemerintah terdiri dari parkir di badan jalan (*on street parking*) atau biasa disebut parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) atau biasa disebut Tempat Khusus Parkir (TKP).

Pada parkir di badan jalan (*on street parking*) atau biasa disebut parkir Tepi Jalan Umum (TJU) pencapaian potensi retribusi yang ada akan berbenturan dengan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, karena jenis perparkiran TJU mengambil badan jalan dalam pelaksanaan perparkirannya. Selain itu pada parkir TJU bentuk pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat relatif minim. Sedangkan pada

parkir TKP dapat dilihat dengan jelas adanya bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam perparkiran baik dalam bentuk penyediaan lahan parkir maupun ketersediaan petugas pengelola. Potensi penerimaan retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang menggunakan jasa parkir di titik parkir TKP tersebut. Banyaknya titik parkir dapat membuat pengguna jasa parkir membayar dari jasa yang telah ia gunakan, sehingga dapat menambah PAD dari sisi retribusi Parkir Jalan Umum.

Kemacetan lalu lintas pada jalan perkotaan di kota-kota besar telah menjadi topik utama yang selalu menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum salah satu faktor yang menyebabkan masalah kemacetan yang semakin lama semakin parah yaitu terus bertambahnya kepemilikan kendaraan (*demand*).

Kemajuan suatu negeri atau kota dapat dinilai dari kondisi sistem transportasinya. Komponen sistem transportasi meliputi sarana, prasarana, dan pengaturan dari sistem transportasi itu sendiri. Untuk mendapatkan kenyamanan dan kepuasan dalam berlalu lintas, ketiga komponen tersebut harus berada pada kondisi yang ideal agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Ketiga komponen tersebut juga harus bekerja secara beriringan karena komponen yang satu selalu berkaitan dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, tidak soal seberapa mewah kendaraan (sarana) seseorang, ia akan tetap merasa tidak nyaman ketika jalan (prasarana) yang dilewatinya berada dalam kondisi yang buruk. Tidak terpenuhinya kondisi ideal tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan transportasi, yaitu kondisi prasarana yang buruk. Permasalahan lain juga dapat timbul dari sisi sarana transportasi yang tidak dapat menampung kebutuhan akan transportasi ataupun pengaturan sistem transportasi yang tidak maksimal, terkait dengan pengaturan operasional, fiskal, legal, maupun organisasinya.

Segala permasalahan transportasi yang datang dari berbagai komponen sistemnya tentu saja perlu mendapatkan perhatian, sebab peluang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat didukung oleh pertumbuhan transportasi pada wilayah tersebut. Kebutuhan akan transportasi cenderung bergerak mengikuti perkembangan populasi di suatu wilayah. Peningkatan populasi di suatu wilayah menyebabkan kebutuhan akan transportasi meningkat pula. Saat ini Kota Palembang, yang merupakan salah satu kota besar di pulau Sumatera, jumlah penduduknya telah mendekati dua juta jiwa. Jumlah ini akibat pembangunan yang semakin meningkat secara tidak langsung menimbulkan adanya pergerakan lalu lintas yang cukup padat sehingga menyebabkan kemacetan yang terlihat di beberapa ruas jalan besar dan persimpangan di Kota Palembang. Ruas jalan yang cukup tinggi aktifitas lalu lintasnya diantaranya adalah kawasan ruas jalan Kol. Atmo sebagai salah satu pusat perdagangan di Kota Palembang.

Fenomena kemacetan menjadi hal yang menarik untuk dikaji, seperti halnya kemacetan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas perdagangan terhadap lalu lintas di ruas jalan Kol. Atmo, dimana banyaknya kendaraan melakukan *on street parking* sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dengan adanya aktifitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah/kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). Akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang pada akhirnya terjadi penyempitan lebar jalan dan besar kemungkinan akan menurunkan kapasitas ruas, besarnya penyempitan tersebut dipengaruhi oleh volume parkir, ukuran kendaraan dan sudut parkir.

Pergerakan lalu lintas yang padat tersebut menyebabkan berbagai permasalahan seperti *on street parking*, tundaan, hambatan samping dan lain sebagainya. Parkir di tepi jalan merupakan fenomena yang menarik untuk dipelajari karena disatu sisi merupakan pilihan yang paling umum dilakukan oleh pengemudi dan di pihak lain merupakan hambatan samping yang dapat mempengaruhi kinerja jalan.

Permintaan akan parkir akibat adanya kegiatan perdagangan dan pertokoan pada ruas Jalan Kol. Atmo yang tidak diimbangi dengan fasilitas ruang *off street parking* sehingga digunakan fasilitas pada *on street parking* yang memberikan dampak kepada kemacetan lalu lintas. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa *on street parking* ini sangat berpengaruh terhadap kinerja ruas jalan.

Parkir di luar badan jalan tidak begitu menjadi persoalan bagi pengguna jalan kecuali ketika kendaraan akan keluar atau masuk tempat parkir. Namun pada parkir yang menggunakan badan jalan, hal tersebut dapat menimbulkan terhambatnya arus lalu lintas dan berkurangnya tingkat pelayanan jalan sehingga pengguna jalan yang hanya melalui tempat tersebut menerima dampak negatif berupa waktu tempuh yang lebih lama yang pada akhirnya menimbulkan *external cost* berupa penambahan biaya operasional kendaraan (BOK) yang dalam hal ini berupa bahan bakar. *External cost* tersebut harus ditanggung oleh pengguna jalan lain yang tidak memanfaatkan fasilitas lahan parkir, namun tidak disadari oleh pengguna fasilitas *on street parking*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Dampak Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang Terhadap Biaya yang Dikeluarkan Masyarakat”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat penulis simpulkan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang terjadi akibat adanya pungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang terhadap biaya yang dikeluarkan masyarakat pengguna jalan, khususnya di Jalan Kol. Atmo?
2. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan retribusi parkir jalan umum di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya pungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang terhadap biaya yang dikeluarkan masyarakat pengguna jalan khususnya di Jalan Kol. Atmo.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan retribusi parkir jalan umum di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat memperoleh informasi lebih mengenai Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang. Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, dalam hal ini

mengetahui manfaat dan dampak yang terjadi akibat adanya pungutan retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, khususnya di Jalan Kol. Atmo. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Diharapkan juga dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari untuk mendukung analisis pada penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Operasional

Sebagai masukan bagi instansi terkait yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan daerah dalam pengelolaan serta peningkatan penerimaan retribusi daerah disektor retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, serta mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari adanya parkir di tepi jalan umum.

Daftar Pustaka

- Abadi, K. & Raharja, A.J. 2001. *Studi Finansial Arus Lalu Lintas Akibat Parkir Tepi Jalan*. Jurnal Simposium IV FSTPT Udayana Bali
- Ardhiyansyah, Indra Widhi. 2005. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. *Skripsi*, UII, Yogyakarta (tidak dipublikasi).
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIE.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2007. *Kota Palembang Dalam Angka*. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 2009. *Realisasi PAD Kota Palembang Tahun 2000-2010*. Palembang
- Diponingrat, Sunarjo. 1957. *Undang-undang Tentang Pokok Pemerintahan*. Penerbit Gunung Agung.
- Hastuti. 2008. *Strategi Peningkatan Potensi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Kabupaten Bogor*, (<http://www.google.com>, diakses 25 Mei 2010).
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J. Riwu. 1982. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Litman, Todd. 2010. *Parking Taxes Evaluating Options and Impacts*, (<http://www.google.com>, diakses 12 Mei 2010).
- Mangkoesebroto, G. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawar, Ahmad. 2004. *Manajemen Lalulintas Perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Munawir, H.S. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

- Nasution, Agus Salim. 1964. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: Penerbit Ganesha.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, Walikota Palembang, Palembang
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedargo. 1992. *Retribusi Daerah dan Perpajakan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeparmoko, Muhammad. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Soeparmoko, Muhammad. 1986. *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Soetrisno, PH. 1984. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Susanti, Ari. 1999. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya. (tidak dipublikasikan).
- Tamin, O.Z. 2000. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Institut Teknologi Bandung
- Teknomo, Kardi, and Kazunori Hokao, *Parking Behavior in Central Business District- A Case Study of Surabaya, Indonesia, EASTS Journal*, Vol. 2 no 2, pp. 551-570, 1997
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta
- Usman B dan K Subroto. 1980. *Pajak-pajak Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Yayasan Bina Pajak.